

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Tinjauan Umum	19

B. <i>Good Governance</i>	25
C. Dasar Hukum dan Landasan Operasional DPRD	30
D. Hak dan Kewajiban Anggota DPRD	34
E. Pengertian Keuangan Daerah dan Keuangan Negara	39
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	42
G. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD	46
BAB III LATAR BELAKANG DIUNDANGKANNYA UU	51
 NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN	
 DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPD, DAN DPRD	
A. Latar Belakang Filosofis	51
B. Latar Belakang Sosiologis	53
C. Latar Belakang Yuridis	55
D. Latar Belakang Dibentuknya DPRD	62
E. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	66
BAB IV TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGEMBALIAN	73
 TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN	
 DANA OPERASIONAL	
A. Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD	73
Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2006 dan Perintah	

	Pengembalian Hak Keuangan DPRD Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2007 Dikaitkan dengan Asas- Asas <i>Good Governance</i>	
	B. Konsekuensi Hukum Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Tidak Mengembalikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional	86
BAB V	PENUTUP	88
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

4. PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional